

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Effendi, Freddy Poernomo dan Indra Ranuh, *Teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Agus Santoso, M. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana 2014.
- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press 2012.
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan*, Bandung, Alfabeta 2014.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta 2015.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gaya Media 2015.
- Fandi R dan Sarwo Edi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok, Rajawali Pers 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Hamid Sanusi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*, Yogyakarta, Budi Utama, 2012.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Erlangga 1983.
- Husseyun Umar, M. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Jakarta, Fikahati Aneska 2015.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksaram, Jakarta, Bumi Aksaram 2013.
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta, Prenadamedia 2014.
- Jusak Johan Handoyo, *Mesin Penggerak Utama Turbin Uap*, Yogyakarta, Budi Utama, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media 2011.
- Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*, Bogor, Sukaharja 2018.
- Moleong, LJ, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya 2015.
- Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, *Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, Yogyakarta, Ar- Ruzz Media 2013.
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Jakarta, Balai Pustaka 2015.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin 2000.
- Nur Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Kaukaba 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Rawls, John. *Theory of Social Justice*, H. Gene Blocker (ed), Ohio: Ohio University, Ohio University 1980.
- Rohmalia Wahab, *Psikologi Belajar*, Jakarta, Rajawali Pers 2016.

- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1991.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siswa 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers 2001.
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2008.
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet 2014.
- Syaukani, *Otonomi Dalam Kesatuan*, Jakarta, Yogya Pustaka 2004.
- Tunjung Herning Sitabuana, *Berhukum di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2017.
- Wahyono, *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta, Penerbit Teraju, 2009.
- William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Yogyakarta, Kanisius 2002.
- William Dunn, N. *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Hanindita Graha Widya, 1999.
- William Dunn, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada university Press 2003.
- Yulianto Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, Gorontalo, UNG Press 2015.
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.76 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:HK.103/2/19/DJPL-16 tanggal 13 Juli 2016 tentang Pelaksanaan 125 Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.

Surat Edaran Nomor:SE.1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:UM.002/79/10/DJPL-16 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Kewenangan Ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.

C. Tesis

Karolus Geleuk Sengadji, *Analisa Penegakan Hukum di Bidang Pelayaran Dalam Rangka Mendukung Program Tol Laut yang Efektif dan Efisien*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Namira Suhada, *Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan*, Tesis Universitas Medan Area, 2019.

D. Jurnal

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Volume. 17, Nomor. 33, 2018.

Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma, Indah dan Miftahul Fikri, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, Riau Law Journal, Volume. 6, Nomor. 1, 2022.

- Aswan Hasoloan, *Sistem Dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal Dan Barang Berbasis Online Pada Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan*, Jurnal Publik UNDHAR MEDAN, Volume. 3, No. 2, 2017.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume. 9, Nomor. 2, 2013.
- Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume. 1, Nomor. 1, 2010.
- Lilis, Nurmaslia .S. S., dan Putra, *Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Konstruksi Kapal Pada Kantor Ksop (Kesyahbandaran Dan Otorita Pelabuhan) Kelas I Dumai Oleh Pt.Wasaka Indonesia Jaya Dumai*, *Journal of Maritime and Education*, Volume. 4, Nomor. 1, 2022.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009.
- Randy Aguw, Y. C. *Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, Jurnal *Lex Administratum*, Volume. 1, Nomor. 1, 2013.
- Riko Sukrevi Ibrahim, *Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Terhadap Keselamatan Kapal Penumpang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Volume. 3, Nomor. 1, 2019.
- Sukrisno dan Chehtiar Denis Piaratama, *Proses Pengurusan Perpanjangan Dokumen Kapal Sebagai Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Di KSOP Kelas III Tanjung Wangi Oleh PT Varia Usaha Lintas Segara Tbk Cabang Banyuwangi*, Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional, Volume. 2, Nomor. 1, 2019.
- Syamsudin, M. *Procedural and Substantive Justice In The Case Of Land Dispute of Magersari*, Jurnal Yudisial, Volume. 7, Nomor, 1, 2014.
- Veni, Turang. S. *Kajian tugas dan wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap, Volume. 4, Nomor. 1, 2019.
- Viana I. R. B., *Paramita dan Malikhatum, Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 1, 2017.

Yusnidah, Meriah Kita Deliani, dan Ema Irwana, *Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Construction, Sertifikat Equipment, Dan Radio Kapal TB. Medelin Signal Dikantor Kesyahbandaran Utama Belawan Padapt. Multi Jaya Samudera Belawan*, *Journal of Maritime and Education*, Volume 4, Nomor 1, 2022.

E. Kamus

Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pandom Media, Jakarta, 2014.

F. Laporan

Laporan Tahunan 2022 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam.

G. Internet

Babelprov.go.id, *Profil Investasi dan Potensi Transportasi*, diakses pada tanggal 21 Maret 2023, pada pukul 14:28 WIB.

Budiman Ginting, *Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diakses tanggal 12/07/2023, pukul 19:21 WIB.

Docking.ID Blog, *Sekilas Tentang ISM CODE & PM 45 Tahun 2012 Tentang Manajemen Keselamatan Kapal*, <http://blog.docking.id/sekilas-tentang-ism-code-pm-45-tahun-2012-tentang-manajemen-keselamatan-kapal/>, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 22:23 WIB.

I Gde Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, <http://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>, diakses tanggal 16/07/2023, pukul 20:11 WIB.

Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan, www.ksopbitung.org, diakses tanggal 27/07/2023, pukul 21:18 WIB.

Lutfi Adi Prabowo, <http://repository.pipsemarang.ac.id/1926/2/52155745T.pdf>, (diakses pada tanggal 07/07/2023, pukul 20:43 WIB).

Mohamad Zaenal Abidin, *Tugas Pokok Dan Fungsi Marine Inspector Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang*

Terhadap Keselamatan Kapal, <http://repository.unimar-amni.ac.id/2800/>, diakses tanggal 27/07/2023, pukul 19:43 WIB.

Yulianta Saputra, *Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum*, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/>. diakses tanggal 25/07/2023, pukul 21:34 WIB.

